

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, didalam UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan isi suatu laporannya dalam tanggungjawab menjalankan dalam menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP ini yang ditangani bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terlebih dahulu setelah itu mendapatkan pertimbangan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 didalam UU Keuangan Negara ini, sudah menentukan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu SAP. SAP ini digunakan untuk dalam pengakuannya untuk pendapatan akan pembiayaan belanja, dalam pengakuannya di aset, dana ekuitas. Laporan keuangan ini akan dihasilkan kepada penerapan SAP yang berbasis akrual dengan maksud dalam menyerahkan untuk manfaat bagi orang yang berpengaruh di dalam organisasi, secara dalam gunanya baik memeriksa terhadap laporan keuangan, untuk harga keluar nantinya. Sejalan dengan adanya prinsip akun dengan sebandingnya untuk manfaat akan diperoleh suatu aset dalam menentukan barang seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penilaian barang terwujudnya.

2.1.2 Akuntansi

Menurut Kieso *et al.* (2016:13), didalam proses akuntansi ini terdapat suatu kegiatan-kegiatan dasar, seperti mengidentifikasi, mengkomunikasi, mencatat

suatu peristiwa dalam ekonomi. Proses dalam akuntansi ini adalah proses pencatatan transaksi terhadap laporan keuangan dalam menggambarkan kegiatan bagi pengguna pelaporan keuangan secara keseluruhan untuk bertujuan yang akan digunakan terhadap pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan ini mencakupi manajer, investor badan pemerintah. Definisi ini dengan efisien dalam menjalankan karakter penting suatu akun seperti komunikasi pengakuan dalam info terhadap kelompok suatu pemakaian barang kepada pemilik yang begitu penting. Karakternya juga akan dipergunakan dalam menjelaskan akuntansi selama bertahun-tahun.

Hasanah dan Fauzi (2017:09), Karakter akuntansi pemerintah yaitu:

1. Tidak ada dalam laporan laba untuk akuntansi didalam akuntansi pemerintahan.
2. Pemerintah melakukan anggaran yang akan digunakan untuk beberapa jenis dana.
3. Akuntansi pemerintahan ini biasanya memakai dalam menggunakan beberapa dana sejenisnya.
4. Dalam pemerintah juga mencatat biaya akan keluaranya modal untuk di neraca juga hasil kegiatan operasi.
5. Suatu pemerintahan juga sifatnya kerasnya disebabkan digantung terhadap aturan.
6. Dalam pemerintah juga yang dalam perkiraan tidak dengan laba suatu barang.

2.12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07

Menurut Siregar (2015:94), PSAP Nomor 07 ini dalam mengurus akan perlakuan akuntansi didalam suatu barang berwujud. Perlakuan akuntansi ini juga mencakupi pengungkapan, pengakuan, penilaian aset. PSAP Nomor 07 ini berlangsung untuk semua anggota-anggota pemerintahan dan tidak termasuk perusahaan. Barang tetap ini suatu barang yang wujudnya dengan periode manfaat dalam setahun lebih yang berguna untuk dimaksudkan hadap yang dilakukan operasional pemerintah dan dimanfaati bersama kelompok umummnya. Dalam pemerintah aset tetap dibagikan kelompok-kelompok yaitu:

- a) Aset Lainnya;
- b) Jaringan Jalan Irigasi;
- c) Pengerjaan Kontruksi;
- d) Bangunan;
- e) Tanah; dan
- f) Mesin.

Menurut Awalia (2022:13), berikut ini menjelaskan tentang suatu pengelompokkan aset tetap:

1. Tanah ini siap untuk dipakai dan juga dibeli dengan tujuannya untuk keperluan instansi di pemerintahan dan didefinisikan terhadap suatu aset tetap.
2. Bangunan dan Gedung, mencakupi semua yang didalamnya ada perlengkapan kantor, peralatan elektronik, kendaraan bermotor juga ada

nilai yang sangat besar terhadap periode berguna dengan setahun lebih dengan keadaan dipersiapkan digunakan di operasional.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan, didalamnya dibangun pemerintah untuk dipelihara yang dengan keadaan dapat dipergunakan terhadap pemerintah.
4. Aset Tetap Lainnya, termasuk juga dari luar kelompok aset tetap dan sudah dibangun akan tetapi terus digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
5. Kotruksi Dalam Pengerjaan, aset tetap didalam rencana akan dibangun yang belum kelar di kalender laporan keuangannya.

2.1.3 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Muam (2011:73), suatu aset untuk pengakuannya merupakan aset tetap organisasi daerah yang dibagi menjadi jurnal finansial dan juga jurnal *statutory* yang akan digunakan dalam memperlihatkan suatu pembayaran neraca, kas, operasional, ekuitas dan juga laporan suatu yang diubah didalam anggarannya.

Menurut PSAP Nomor 07 ini agar diakuinya dalam barang wajib memenuhi sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Memiliki masa manfaat yang lebih dari setahun;
3. Biaya untuk perolehannya agar aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak untuk dimaksudkan dijual didalam operasi kegiatan entitas; dan
5. Dapat dibangun dengan maksudnya akan berguna dalam kegiatan operasionalnya.

2.1.4 Pengukuran Aset Tetap

Menurut Siregar (2015:95), pengukuran aset tetap ini dapat didasarkan untuk biaya perolehannya. Untuk biaya perolehan ini merupakan suatu kas yang wajib dibayarkan didalam nilai donasi yang telah dipersembahkan serta diperolehnya dalam barang tetap ini disaat perolehannya dengan kontruksi dengan pada barang itu dengan keadaan akan digunakan. Suatu biaya untuk barang tidak mungkin diketahui dalam pengukuran aset tetap sebagai berikut:

1. Biaya perolehan ini sebagai tanah dalam mengikuti harga belinnya, biaya pembebasan tanah, dan juga biaya yang dapat diperoleh hak atas tanah, pengukuran, pematangan dan biaya yang akan keluar untuk tanahnya yang akan harus dipakai.
2. Biaya perolehan untuk mesin ini mencakupi suatu beli, angkutan, instalasi, dan juga biaya dalam mendapatkan peralatan dan mesin yang akan digunakan terhadap untuk diperoleh.
3. Biaya barang lainnya, mencakupi yang akan dibiayai dan juga wajib untuk mendapat suatu barang tiba aset tersebut untuk digunakan.

2.1.5 Penilaian Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 didalam PSAP Nomor 07 penilaian aset tetap ini merupakan barang yang berwujud dan juga dipenuhi dalam pengakuan dalam barang juga bagikan dalam barang yang berwujud, yang juga awalnya wajib diukur yang didasarkan biaya perolehannya. Jika barang ini diterima akan tidak dengan suatu nilai, dalam biaya barang ini merupakan besarnya penilaian wajar yang akan diterima. Didalam terhadap barang

memungkinkan diakui organisasi untuk hadiah. Contohnya, tanahnya mungkin akan dikasih pemerintah daerah tidak dengan nilai yang tidak mungkin pemerintah wilayahnya yang dibangunnya jalan, tempat parkir kendaraan atau juga khusus untuk jalan kaki.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP Nomor 07 dalam barang ini dengan mungkin akan terima tidak dengan nilai melewati implementasi sebagai bentuk kuasanya yang khusus pemerintah setempat. Salah satu misalnya didalam kuasanya dan menaati peraturan, pemerintah akan bertindak menyitanya suatu atas bangunan dan tanahnya dengan hendak bisa dipergunakan juga dalam lokasi kegiatan. Dalam barang tetap dengan akan terimanya wajib nilainya didasarkan wajarnya dalam suatu barang yang akan diterimanya.

2.1.7.1 Komponen Biaya

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP Nomor 07 ini perolehannya terhadap dalam barang tetap juga terdirinya akan harganya dan kontruksinya, juga masuk didalamnya ada bea akan impor atau selalu didapati dengan langsungnya untuk memegangnya barang ini dalam keadaan akan menjadi barang ini segera mengerjakan terhadap penggunaan. Berikut contoh biaya yang akan dipakai dengan langsung yaitu:

- a) Biaya dalam kesiapan tempat;
- b) Biaya untuk mengirim diawal;
- c) Biayanya untuk pemasanganya;
- d) Biaya profesionall;
- e) Biaya kontruksi.

2.1.6 Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Harahap (2011:20), pengungkapan suatu aset didalam laporan keuangan ini wajib dilihat untuk memadai, tanpa dinyatakan lain didalam laporan auditor. Dari definisi ini, dengan harapan agar supaya laporan keuangan ini dapat disajikan yang secara penuh.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP No. 07 pengungkapan barang tetap ini merupakan laporan keuangan yang wajib diungkapkan dalam macam-macam barang tetap sebagai berikut:

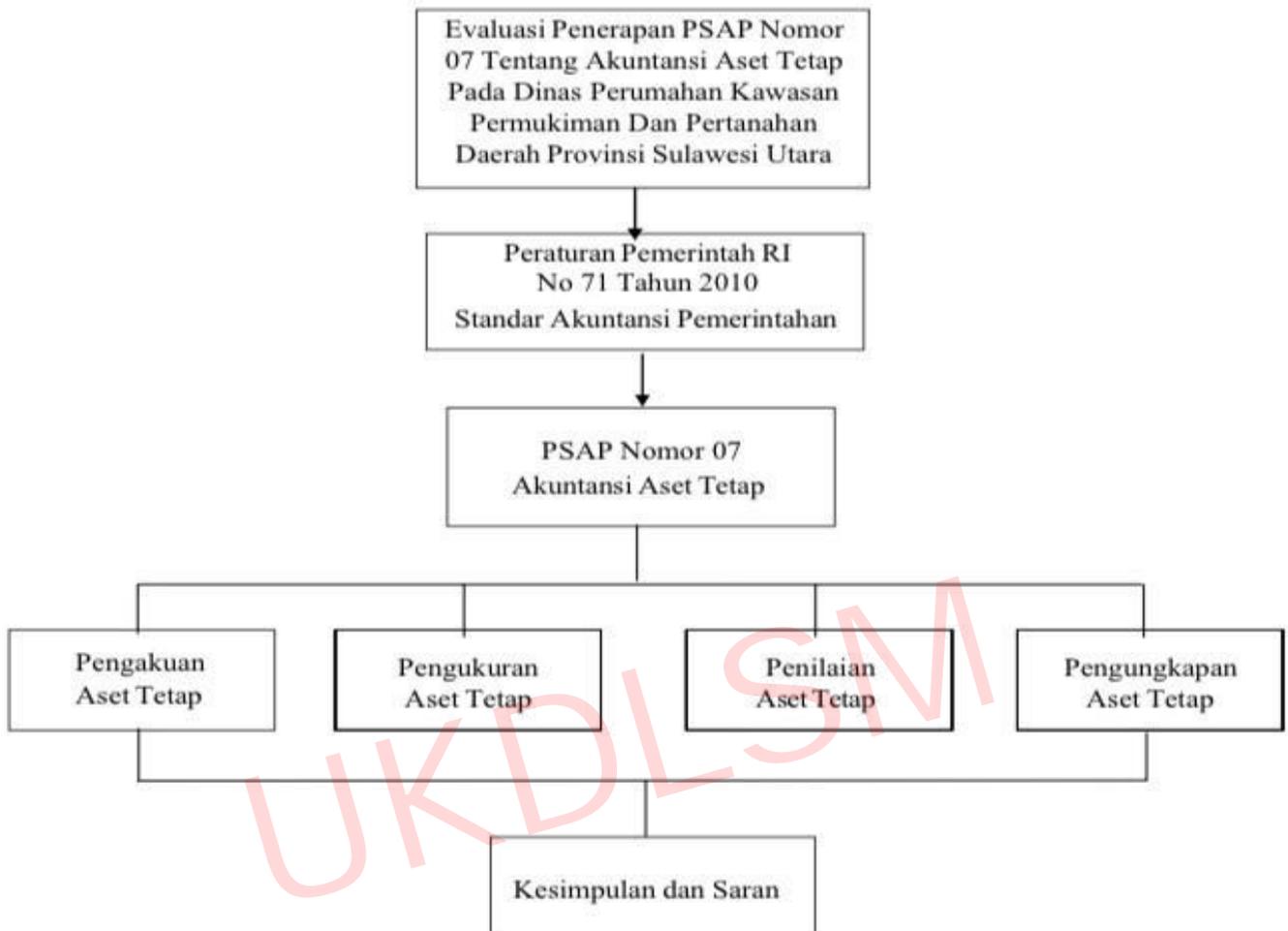
- a) Penilaian didasari dalam menentukan suatu akhir periode penilai tercatatnya;
- b) Rekonsiliasi dalam total catatanya dengan awalnya suatu masanya untuk ditunjukkan dalam:
 1. Dalam barang penambahan;
 2. Dalamnya suatu pelepasan;
 3. Penyusutan untuk akumulasi terhadap nilainya.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

NO.	KETERANGAN	
1	Nama Peneliti	Wulandari Anis Ambarwati
	Judul Penelitian	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini untuk diabadikan sehingga dapat mengambil kesimpulannya dalam hasil penelitian mengatakan untuk Penerapan PSAP No. 07 barang tetap yang ada pada laporan ini termasuk juga pengungkapan, penilaian, pengakuan terhadap barang berwujud sudah meemnuhi apa yang di terapkan di peraturan. Dan juga keseluruhannya didapati satu kesimpulan dalam biaya perolehann tanahnya belum diterapkan dan diukur di Kabupaten Bantul. Karena ini berdasarkan sesuai adanya data di organisasi tersebut.
2	Nama Peneliti	Ria Palandeng, Morasa Jenny dan Lambey Robert.
	Judul Penelitian	Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian dan pembahasan juga ini sudah dilakukannya pada barang tetap yang berwujud termasuk pengungkapan, penilaian, pengukuran dengan penyajian. Evaluasi ini memberikan kesimpulan yaitu manfaat-manfaat barang berwujud yang dikelolanya di Disbudpar Kabupaten Minahasa sudah diakui pada saat barang tetap telah diterima secara resminya. Maka kesimpulan diakhir ini evaluasi aset tetap yang telah dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

NO	KETERANGAN	
3	Nama Peneliti	Eva Juniar Agustina, Utpala Rani
	Judul Penelitian	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
	Tahun	2020
	Hasil Penelitian	Hasil Kesimpulan didalam skripsi ini seperti adanya satu masalah yaitu pengelolaan barang sudah ada lama di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang yaitu susah nya mencari barang yang sudah ada di tahun yang lalu seperti aset yang tidak layak pakai.
4	Nama Peneliti	Rihma Wahyu Rahmawati
	Judul Penelitian	Analisis Penerepan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	Secara proses akuntansi telah dilakukan bagi Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir sepenuhnya dengan Prinsip Akuntansi. Proses akuntansi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari semua transaksi pengeluaran kas dan penerimaan yang dicatat terlebih dahulu.

2.1.2 Model Penelitian



Sumber: Data Olahan

Berdasarkan model penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini meneliti terhadap bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan apakah sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 khususnya pengungkapan, penilaian barang tetap, pengakuan barang tetap dan pengukuran barang tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara. Dan penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan mulai sejak bulan Februari sampai Mei 2023.

3.2 Jenis dan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2016:4), didalam penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang didalamnya untuk memahami suatu fenomena atau masalah yang terjadi pada objek penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam sumber penelitian ini. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Menurut Sugiyono (2013:308), sumber data yang memberikan langsung terhadap pengumpul data disebut data primer. Cara peneliti menyusun penelitian ini menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga melakukan dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan judul skripsi.
- b. Menurut Sugiyono (2013:309), data yang diperoleh dari buku, catatan merupakan data sekunder. Dalam memperoleh data penelitian ini berupa laporan neraca 2020 dan 2021. Data yang dibutuhkan adalah profil dinas, laporan neraca, struktur organisasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2020:114), Wawancara ini bertemunya lebih dari satu orang dengan menukar informasi juga tanya jawab, agar dapat dikontribusikan arti di suatu periodenya.

Wawancara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Dalam menggunakan pedoman wawancara, juga memberikan pertanyaan agar terinci dan sesuai kebutuhannya.. Ibu Meinny sebagai Kasubag Keuangan dan Perencanaan dalam memberikan informasi. Dalam wawancara dengan harapan mengetahui tentang pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan terhadap barang berwujud.

b. Dokumentasi

Menurut Efferin (2008:178), penelitian akuntansi ini dengan menggunakan dokumen-dokumen yang harus dianalisis dan dipelajari. Untuk menganalisis dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Koagouw *et al.* (2023:3), Metode deskriptif kualitatif suatu metode untuk menganalisis, menjelaskan dan membandingkan dengan dokumen catata seperti pengungkapan, penilaian, pengakuan dan pengukuran dalam barang. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam menganalisis didalam penelitian ini yaitu:

1. Data-data yang telah disatukan oleh peneliti juga harus melewati wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan judul skripsi.
2. Data wawancara yang telah di kumpul harus mendiskripsikan sesuai dengan metode yang ada yang berhubungan dengan penerapan aset tetap khususnya pengungkapan, pengukuran, pengakuan, penilaian.
3. Mengevaluasi dalam penerapan yaitu apa yang sudah di terapkan dibuku PSAP dengan di instansi tersebut khususnya untuk perlakuan aset tetap.
4. Setelah melewati menyatukan data, mendeskripsikan dan mengevaluasi selanjutnya membuat kesimpulan dan saran terhadap penerapan aset tetap pada instansi yang di gunakan untuk meneliti tempat tersebut.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4.1.1 Sejarah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri dan ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2017 sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2016 dalam Kedudukan Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai bertugas secara efektif pada bulan Januari 2018. Dimana sebelumnya dinas ini melekat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman. Kemudian dipisahkan sehingga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bisa berdiri sendiri.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

VISI : Terwujudnya rumah dan kawasan yang nyaman, aman dan kepastian hukum status tanah pemerintah daerah dalam berkelanjutan menuju masyarakat yang berdaulat dan berbudaya.

MISI : 1. Melaksanakan program pembangunan perumahan dan permukiman

yang mantap.

2. Mewujudkan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat yang kurang mampu.
3. Mewujudkan permukiman rakyat yang mantap juga berkelanjutan dengan pembangunan.
4. Membangun sarana dan prasarana umum untuk perumahan dan kawasan permukiman.
5. Mewujudkan pembangunan lingkungan siap bangun dan kawasan siap bangun yang terencana.
6. Mewujudkan pembangunan rumah dinas pemerintah daerah provinsi.
7. Menjamin kepastian status tanah yang dikuasai pemerintah daerah.

4.1.2 Logo Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 2.3

Lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara



Sumber Data: Data dari website Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Tidak ada logo/lambang khusus tetapi menggunakan logo/lambang yang sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pengertian gambar-gambar Lambang

Daerah:

1. Warna kuning disisi luar, warna biru sebagai dasar.
2. Dirangkaikan adanya buah cengkih 17 (tujuh belas) warna tersebut merupakan perpaduan dari warna hijau kecoklatan dan warna hijau kuning. Sebelah kanan didapati buah pala yang terbuka berjumlah 8 (delapan) yang warnanya kuning.
3. Tulisan Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia didalamnya ada angka di buah cengkeh 17 (tujuh belas) buah, pala 8 (delapan), juga padi 45 (empat puluh lima) yaitu 17-8- 1945.
4. Terdapat 4 (empat) dalam buah kelapa dengan lambang Provinsi Sulawesi Utara tanggal 23 September 1964, Ditengahnya ada lingkaran dalam buah padi juga pala terdapat 23 (dua puluh tiga) dengan untaian biji sejagung bentuknya bulat. Terdapat juga pihon kelapa berdaun 9 (sembilan).
5. Gambar yang bentuknya buah cengkeh, pohon kelapa, jagung, pala, padu ini sudah menggambarkan seluruh kekayaan terutama untuk sumber rakyat di wilayah ini.
6. Bertuliskan Sulawesi Utara ini ada di bagian bawah dengan pohon kelapa dan ada pita putih dalam barisan merah juga warna hitam.
7. Melambangkan suatu keagungan, kekayaan ini berwrna orange/emas.
8. Melambangkan suatu kemakmuran, kesuburan ini berwarna hijau/biru
9. Melambangkan kebesaran, kesejahteraan ini berwarna kuning.
10. Melambangkan keberanian beserta semangat yang menyala atas kecintaan untuk agama dan negara ini berwarna merah.
11. Melambangkan kedamaian dan kesucian berwarna putih.

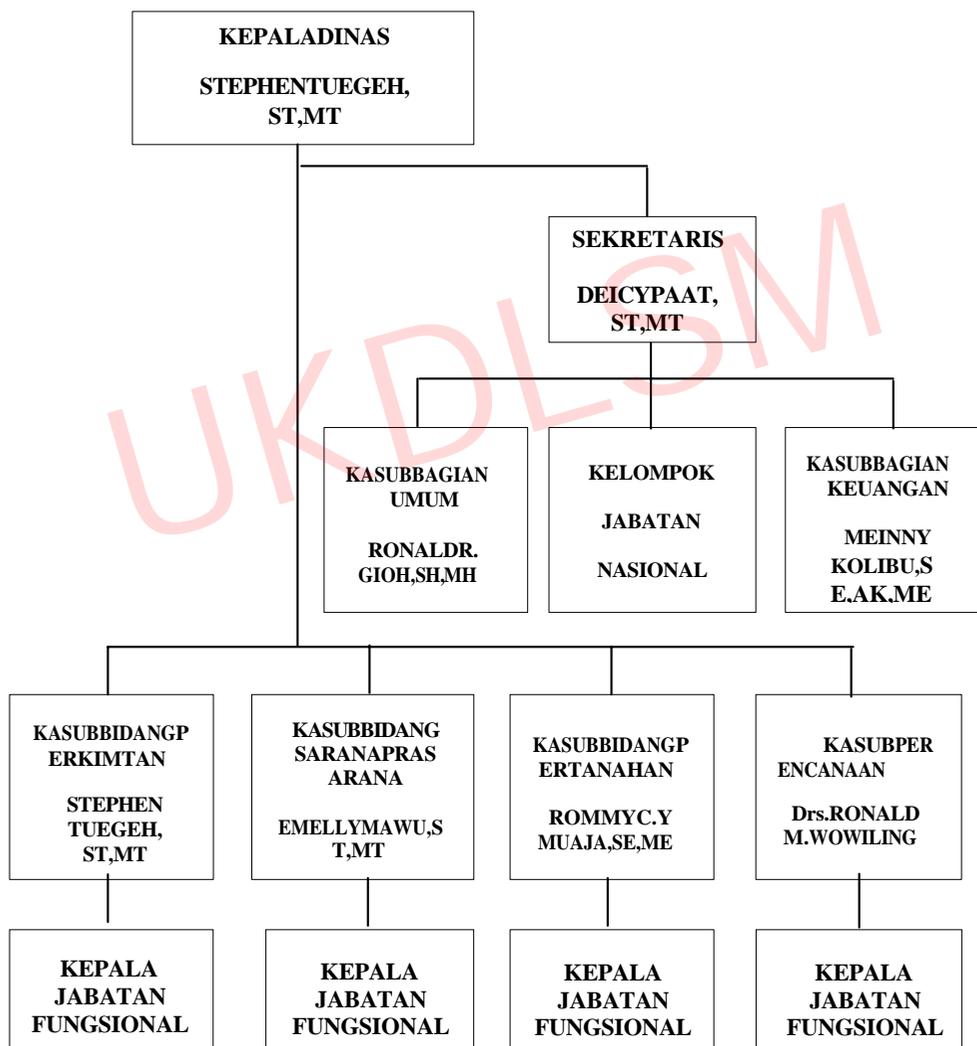
12. Melambangkan kecintaan pada tanah air dengan warna coklat
13. Teguh dan kuat ini lambangnya dan berwarna hitam.
14. Kebanggaan ini lambangnya dan berwarna ungu.

UKDLSM

**4.13 Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Bagan 4.1.5

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
DEARAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



Sumber: Data Instansi

4.1.4 Deskripsi Pekerjaan

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pernyataan program urusan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Penataan rencana atas pembinaan dalam dijalankannya tugas;
- c. Perencanaan dan keuangan dalam menyelenggarakan urusan administrasi dalam bidang;
- d. Pengurusan untuk menyelenggarakan dalam bidang perumahan;
- e. Pengurusan dalam bidang sarana prasarana;
- f. Pengurusan dalam bidang pertanahan;
- g. Pengurusan dalam bidang perencanaan; dan
- h. Penyelenggaraan atas tugas yang diberikan Gubernur.

Tugas sekretaris yang diberikan oleh kepala dinas dan juga tugas seperti mengurus pelayanan dalam bentuk administrasi, keuangan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, maka sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyelenggaraan anggaran, program, administrasi dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;

- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran;
- d. Menyusun laporan kegiatan dan;
- e. Membuat tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi langsung 2 (dua) Sub Bagian, yakni:

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 - a. Penyusunan dalam menjalankan anggaran dan program;
 - b. Pengurusan dalam menyusun dan menganalisa perencanaan anggaran dan program;
 - c. Mengelola dan menyusun untuk laporan capaian kinerja keuangan dalam akuntabilitas.
 - d. Mengurus keuangan mencakup perbendaharaan, pembukuan, verifikasi dan gaji.
 - e. Mengurus perubahan dalam anggaran kinerja;
 - f. Mengurus pengeluaran terhadap pengeluaran kas, utang piutang, anggaran dan penerimaan kas.
 - g. Merencanakan evaluasi keuangan dan monitoring suatu perencanaan;
 - h. Merencanakan prosedur akuntansi dan pengembangan untuk sistem; dan;
 - i. Menjalankan tugas lainnya atas perintah pimpinan..

2. Sub bagian umum dan kepegawaian

- a. Merencanakan dalam kegiatan tata usaha umum;
- b. Melaksanakan, meneliti dalam menyusun surat administrasi sesuai undang-undang;
- c. Merencanakan surat administrasi keuangan;
- d. Mengurus upacara dan pertemuan rapat dengan fasilitas beserta menyiapkan keprotokolan untuk perjalanan dinas;
- e. Mengelola bahan dan menyusun informasi bagi kepentingan rakyat;
- f. Memelihara keamanan, keindahan serta kebersihan;
- g. Menyusun dokumentasi dan menyiapkan daftar untuk inventaris serta arsip;
- h. Menjalankan kegiatan dan monitoring pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan;
- i. Meneliti untuk menyusun peraturan undang-undang dan menyiapkan bahan;
- j. Melaksanakan dalam melakukan pertimbangan hukum serta menyiapkan bantuan hukum;
- k. Mengatur kuasa untuk penegakan hukum yang ada;

- l. Mengurus dokumentasi serta sosialisasi hukum;
 - m. Menyusun data kepegawaian dan menyiapkan formulir;
 - n. Mengatur administrasi kartu pegawai, kenaikan pangkat, gaji dengan adanya peraturan undang-undang yang berlaku.
 - o. Menyiapkan administrasi dalam kinerja untuk pemberian tunjangan
 - p. Mengurus penghargaan, sumpah/janji, pengembangan dan cuti;
 - q. Menyiapkan data PNS;
 - r. Menyediakan bahan fasilitas; dan
 - s. Menjalankan tugas atas perintah pimpinan.
3. Bidang perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai tugas untuk masyarakat yang terkena dalam musibah dan rumah akan direhabilitasi untuk rumah korban bencana juga masyarakat terkena relokasi dalam pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun, rumah komersil, rumah khusus, rumah swadaya, merumuskan, menetapkan dan menjalankan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi sebagai berikut:
- a. Fasilitasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan;

- b. Pembangunan teknis pelaksanaan penyelenggaraan perumahan;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan rumah komersial, rumah swadaya, rumah umum;
- d. Penyelenggaraan perencanaan strategis dan rencana pekerja dalam mengelola rumah susun dan rumah khusus milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun dan rumah khusus milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Pelaksanaan penataan permukiman kumuh;
- g. Pelaksanaan penataan permukiman kumuh pengelolaan sanitasi yang layak dikawasan permukiman kumuh;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam lingkungan untuk kawasan yang siap dibangun;
- i. Melaksanakan peningkatan pengawasan kualitas permukiman yang kumuh;
- j. Pelaksanaan bantuan teknis kelembagaan melalui pendampingan bantuan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pada penyelenggaraan

- perumahan permukiman;
- k. Fasilitas penyusunan bahan kuasa wilayah dengan sebuah rumah untuk korban bencana yaitu rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah komersial, dan kawasan permukiman;
 - l. Penyediaan informasi atas data pengembangan untuk jumlah rumah yang terkena bencana provinsi;
 - m. Pelaksanaan dalam penyediaan lahan untuk korban bencana provinsi;
 - n. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pada penyelenggaraan perumahan permukiman; dan
 - o. Pengurusan tugas atas perintah pimpinan.
4. Bidang sarana prasarana memiliki tugas penyelenggaraan sarana prasarana perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus, sebagai berikut:
- a. Penyusunan bahan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana perumahan;
 - b. Pengurusan atas sarana prasana perumahan;
 - c. Pelaksanaan untuk data dalam sistem yang mendukung penyelenggaraan saran prasarana perumahan;
 - d. Pneyiapan rencana untuk kemampuan menengah dalam terlaksana rancangan bagi badan hukum;
 - e. Pengurusan bahan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan permukiman;
 - f. Pelaksanaan dalam kawasan untuk permukiman dan penyediaan sarana prasarana; dan

- umum, perumahan, kawasan permukiman dan kawasan khusus;
- k. Pelaksanaan pengamanan fisik tanah milik/dikuasai pemerintah provinsi yang tidak dikelola oleh perangkat daerah lain; dan
 - l. Pelaksanaan tugas atas perintah pimpinan.
6. Untuk Bidang perencanaan program memiliki tugas melaksanakan administrasi perencanaan program, pengendalian dan pengawasan, atas laporan perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus dan pertanahan, sebagai berikut:
- a. Penyiapan dalam kekuasaan dan koordinasi dalam bidang perencanaan program;
 - b. Pengordinasian pelayanan bentuk integrasi atas administrasi dalam bidang perencanaan program;
 - c. Pengurusan kuasa dalam bidang perencanaan program;
 - d. Pengurusan dalam perencanaan teknis;
 - e. Pengurusan dalam pengawasan dan pengendalian;
 - f. Pengurusan untuk pelaporan dan evaluasi;
 - g. Pelaksanaan perencanaan perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus dan pertanahan;
 - h. Penyiapan data perencanaan teknis program kegiatan perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus dan pertanahan;
 - i. Pengoordinasian perencanaan teknis perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus dan pertanahan;
 - j. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan program perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus dan

pertanahan;

- k. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program perumahan, kawasan permukiman, kawasan khusus dan pertanahan; dan
- l. Pemberian tugas atas perintah pimpinan.

UKDLSM

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Gambaran Umum Aset Tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4.2.1 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yang ada di suatu aset tetap yang berupa dengan aset pemerintah, oleh karena itu untuk penyajiannya di neraca sesuai dengan kaidah.

Berikut barang berwujud di pemerintah:

- a. Bentuk barang ini mempunyai laporan umumnya yang dimanfaatkan terhadap barang lain, sebagai contoh dalam kekuasaannya, universitas serta kontraktor. Dalam organisasi juga ini sesuai dengan PSAP Nomor 07, Karena dalam pemanfaatan aset di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tidak digunakan oleh kantor tersebut saja, tetapi juga di manfaatkan oleh entitas lainnya.

- b. Hak Terhadap Tanah

Dalam hal ini tidak dengan definisi aset tetap karena merupakan aset tetap dengan di kuasai dalam komsumsi untuk operasi pemerintah, seperti bahan dan juga perlengkapan ini.

Untuk klasifikasinya, aset tetap ini sudah dikelompokan terbagi yang sama terhadap sifat untuk kegiatan operasi. Berikut ini kelompok aset tetap yang digunakan:

a. Tanah

Tanah ini untuk kelompok didalam barang wujud merupakan suatu tanah dalam dikuasai pemerintah atau juga dimanfaatkan pada sebagian masyarakat umum dan juga dalam keadaan siap untuk di pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin ini sudah bagi untuk suatu barang tetap merupakan mesin dan alat dengan dikuasai bagi pemerintah di aktivitas operasioanl juga menjadi manfaat bagi masyarakat umum dengan keadan siap untuk digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan ini juga sudah bagikan ke akun barang tetap yakni bangunan serta gedung dengan memiliki kekuasaan pemerintah dalam aktivitas operasi atau sudah dimanfaatkan bagi masyarakat dengan keadaan dipakai.

d. Jaringan, Jalan Irigasi

Jaringan jalan irigasi ini sudah dibagikan ke bentuk barang tetap yaitu dengan memiliki kekuasaan bagi pemerintah juga aktivitas pemerintah yang juga dimanfaati bagi rakyat dengan keadaan dapat digunakan..

e. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya meliputi barang tetap yang tidak harus dibagikan kedalam kelompok barang tetap diatas, tapi dapat masuk definisi aset tetap.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dengan pengerjaan mencakupi barang untuk hal ini juga

sementara membangun, pada kalender neraca juga belum selesai membangun seluruhnya. Untuk harta tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bermacam macam yaitu jalan, irigasi, mesin, alat, gedung dan tanah.

Berikut adalah gambar Laporan Neraca pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dan 2021

Gambar 4.2

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2021	2020
1	2	3	4
1	ASET	8.850.706.810,20	7.925.855.264,89
2	ASET LANCAR	189.668.206,00	72.151.225,00
3	Kas dan Setara Kas	159.797.587,00	-
4	Persediaan	29.870.628,00	72.151.225,00
5	ASET TETAP		
6	Tanah	2.982.562.000,00	2.982.562.000,00
7	Peralatan dan Mesin	8.199.207.583,44	7.922.276.432,97
8	Gedung dan Bangunan	4.207.456.924,44	4.188.923.014,10
9	Jalan, Irigasi dan Jaringan	239.440.490,00	154.807.000,00
10	Aset Tetap Lainnya	2.619.424.773,58	2.377.155.270,08
11	Kontruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
12	Akumulasi Penyusutan	(6.788.262.777,26)	(6.788.262.777,26)
13	ASET LAINNYA	136.712.100,00	136.712.100,00
14	Aset Tidak Berwujud	118.248.000,00	118.248.000,00
	Aset Lain-lain	18.464.100,00	18.464.100,00
	JUMLAH ASET	8.850.706.810,20	7.925.855.264,89

Sumber Data: Data Instansi

Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, klasifikasi aset ini menjadi bagian-bagian yaitu irigasi, gedung, jalan, alat, mesin, tanah dan aset lain. Hal ini sepenuhnya dalam hasil wawancara dibagian lampiran dengan Ibu Meinny dan juga dikuatkan dengan data laporan keuangan.

4.2.3 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 sudah dijelaskan untuk aset tetap ini di masa mendatang akan diakui dan juga berapa nilainya yang diukur dengan andal. Di dalam aset tetap ini dalam mendapatkan diakui sebagai aset tetap, aset ini harus dapat penuhi didalam bentuk sebagai berikut:

- a. Barang yang Berwujud;
- b. Masa manfaat di ekonomi lebih setahun lebih
- c. Diukur dengan handal terhadap perolehan;
- d. Dimaksudkan tidak dapat dijual di operasional; dan
- e. Digunakan setelah dibangunnya aset tetap.

Dalam pencatatan ini dengan besarnya harga perolehan. Gedung dan bangunan ini diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan tidak harus membangun sendiri. Tanah ini tanah yang dapat diperoleh untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang berwenang dapat membeli tanah dalam kegiatan instansi pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pencatatan yang sebesar harga juga termasuk ini didalam totalnya dari perolehan. Dengan adanya barang di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai manfaat ekonomis dalam setahun dan semuanya berwujud.

Hal ini sudah sesuai karena dilihat yang ada dilampiran untuk hasil wawancara dan dikuatkan dengan data laporan neraca keuangan pada dinas yang disampaikan di atas.

Jadi dalam ini sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk semua aset yang berwujud dengan manfaatnya terhadap pemerintahan dengan kepentingan umum. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini juga mempunyai aset-aset yang ada dikantor ini seperti tanah, dan tanah ini dengan maksud berdiri suatu bangunan sekolah dengan di bangun oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan ini termasuk bukan tanah yang kosong.

Dalam hasil wawancara yang ada dilampiran dapat juga ditarik kesimpulannya atas pengakuan aset tetap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti bangunan juga tanah sudah sepenuhnya memenuhi dalam pengakuan barang berwujud.

PSAP Nomor 07 menyebutkan didalamnya sudah menetapkan bentuk barang berwujud ada suatu masa manfaat setahun lebih, dalam kelompok ini wajib guna dalam manfaatnya ekonomi di masa depannya juga dapat diserahkan dengan barang berwujud, dengan keadaan maupun tidak langsung, untuk aktivitas operasional pemerintah. Aset tanah dapat ini dikatakan dalam hasil wawancara tidak mungkin ada penyusutannya, sebab semakin lamanya dan semakin besarnya nilai tanah itu pasti masa manfaatnya akan lebih dari setahun bahkan puluhan tahun. Dalam kendaraan dalam di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini termasuk mesin sebab kendaraan di dinas ini sudah termasuk dalam peralatan dan mesin.

Jadi di dalam kendaraan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini juga sudah termasuk pada peralatan dan mesin. Dalam hal ini yang sudah diungkapkan Ibu Meinnydi dalam wawancara yang ada di lampiran.

Jadi tentang kriterianya sudah sepuh dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam periode akan manfaat di pengakuan barang yang berwujud sudah lebih dari setahun.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatakan untuk pengakuan barang berwujud ini andal jika barang sudah akan menerima dan di berikan miliknya saat penguasaannya ini sudah pindah tangan.

Untuk tanah ini, pengukurannya akan disesuaikan berdasarkan sertifikat tanah ini, disebabkan banyaknya tanah di dinas tersebut dari hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga dalam sertifikat masih banyak dengan mengatas namakan Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah pernah diberikan aset oleh bank sulut yaitu mobil, dan lamanya surat ini lengkap akan ditulis dalam aset dan juga akan dilihat oleh aset tetap.

Berdasarkan wawancara hasil ini yang ada dilampiran dapat mengambil kesimpulan untuk aset tetap termasuk mesin dan alat yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini disimpulkan sudah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap dengan diterimanya bukti-bukti dar surat terhadap kendaraan seperti mobil kantor ini yang diberikan oleh bank sulut.

Pemaparan berdasarkan narasumber yang tertera dilampiran ini diambil kesimpulan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti mesin dan alat yang sudah sesuai tipe pengakuan.. Dalam gedung tanah di aset ini sementara belum diterapkan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dalam tipe pengakuan tetap apabila perolehan dalam biaya aset yang diukur untuk handal.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 meneruskan untuk tujuannya dari aset tetap terutama dalam perolehan aset tetap untuk dipergunakan bagi pemerintah dengan menunjang aktivitas operasional dengan maksudnya tidak dipergunakan untuk dijual. Dalam kekuasaannya tidak dapat untuk menjual suatu aset, karena kalau aset tersebut didapati kerusakan akan bertindak diperbaiki terhadap aset tersebut.

Dalam lampiran yang dari wawancara dikatakan aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dalam kriteria pengakuan didalam aset berwujud yang ada di dinas tersebut.

Kriteria pengakuan aset tetap yang terakhir adalah suatu aset tetap yang diperoleh dengan maksudnya digunakan. Dalam kegiatan pemerintah harus diterapkan prinsip-prinsip agar supaya sesuai dengan kaidah, akuntabilitas untuk melakukan suatu rancangan anggaran yang ada di dinas tersebut.

Gedung dan bangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini yang dibangun sekolah dan tidak juga memungkinkan untuk tidak dijual dan sudah pasti dipergunakan dalam operasional instansi.

Untuk hal ini didalam pengakuan aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sepenuhnya juga menerapkan dasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dalam dilampiran dalam suatu wawancara tersebut, namun dalam kriteria untuk suatu tipe perolehan biaya diukur dengan handal ini juga belum mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 seperti bangunan serta tanah

disebabkan belum ada bukti-bukti yang dalam kepemilikan aset.

4.2.4 Pengukuran Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 aset tetap ini juga harus dinilai berdasarkan dari harga biaya perolehannya jika nilai di aset tetap tersebut gunakan harga dari perolehan biaya ini tidak harus jelas karena jelas nilai yang ada pada aset tetap menggunakan biaya perolehan. Lanjutan juga yang ada pada PSAP Nomor 07 juga mengatakannya untuk suatu barang berwujud ini dengan penuh kualifikasi agar supaya diakui terhadap bentuk aset tetap dan diklasifikasikan dalam aset tetap sebab awal wajib untuk ukuran yang didasarkan dari harga perolehannya.

Maka biaya perolehan aset tetap ini tidak memungkinkan akan diketahui, pengukuran aset tetap sebagai berikut:

1. Harga Biaya perolehan tanah aset ini mengikuti dengan harga beli, biaya pembebasan tanah, dan juga biaya dalam memperoleh hak dalam atas tanah, biaya pematangannya, dengan penimbunan, penilaian akan dikeluarkan dalam tanah sedia digunakan.
2. Harga perolehan dalam peralatan dan mesin ini mencakupi dari harga beli untuk biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya dalam mendapatkan mesin dan alat yang akan gunakan.
3. Harga perolehan bangunan serta gedung mencakupi dalam pembelian juga suatu konstruksi.
4. Harga dari perolehan jaringan irigasi serta jalan melewati dari biaya perolehan dan irigasi jaringan serta jalan sudah sedia digunakan.
5. Biaya perolehan barang berwujud lainnya, mencakupi dari yang akan keluar dengan wajib dalam diperoleh barang sampai dipakainya.

Pernyataan yang ada diatas sudah memenuhi sesuai dengan yang sudah diterapkan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penilaian aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah akan dicatat yang didasarkan dari harga perolehannya. Dalam pengukurannya untuk semua aset disini sama sebab aset ini menggunakan harga dari biaya perolehan. Maka aset ini akan mengalami penyusutan, jika mengukur aset tetap ini menggunakan dalam nilai wajar.

4.2.5 Penilaian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 menerapkan dalam barang dengan mengikuti kualifikasi dalam aset tetap ini dan serta kelompok dalam suatu aset tetap, di awal aset tetap ini juga siap diukur berdasar dari biaya perolehan. Maka aset tetap ini dapat guna yang tanpa nilai, biaya aset ini akan diperolehnya.

1. Tanah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 menyebutkan asetnya untuk mengukur dengan guna dari harga perolehan akan tetapi bila didalam suatu aset ini diperoleh dalam cara hibah sudah jelas aset berdasarkan nilai wajar. Dalam hadapan aset ini mungkin akan diterima instansi pemerintah dalam publik caranya dengan donasi serta hibah.

Untuk tanah yang ada pada dinas ini dengan menilai dalam nilai wajar, sebab tanah di dinas perkintan merupakan tanah yang dari hibah yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam Penilaian awal didalam aset tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah maka memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dalam kriteria aset tetap disebabkan peroleh dengan hadiah jadi dalam ukuran harus digunakan dengan wajar nilainya.

2. Gedung dan Bangunan

Menurut PSAP Nomor 07 aset dinilai berdasarkan perolehan biaya. nilai untuk aset tetap dalam guna harga biaya perolehan belumlah akan mungkin karena dalam wajar nilainya aset didasari perolehan.

Didalam pengukuran aset tetap ini semuanya disini sama, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan harga dari biaya perolehan. Jika aset ini mendapat usutan, bila diukur aset menggunakan wajarnya nilai. Gedung dan Bangunan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 untuk aset tetap berdasarkan hasil wawancara yang ada di dinas tersebut.

3. Peralatan dan Mesin

Menurut PSAP Nomor 07 aset tetap dinilai berdasarkan dari biaya perolehan. Jika aset nilai tetap ini yang akan guna harga peroleh belum mungkin sehingga tetapkan aset nilai akan berdasari untuk nilai wajarnya nilai dalam perolehannya.

Didalam pengukuran semua aset disini sama semuanya. di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Wajarnya nilai terhadap barang menjadi usut jika harus menilai dengan wajar.

4.2.4.1 Komponen Biaya

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam aset tetap menyebutkan jika perolehan dalam akun aset tetap berdiri dengan beli harga dan kontruksinya, masuk untuk bea impor setiap biaya juga dapat langsung untuk menampilkan aset ini dalam keadaan yang menyusun aset ini samapai bekerja guna dimaksudkannya.

Contoh biaya dalamnya persiapan dengan antara lain:

1. Biaya persiapan tempat;
 2. Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
 3. Biaya pemasangan;
 4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 5. Biaya kontruksi
- A. Tanah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan jika tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan ini meliputi harga dalam pembelian dan biaya pembebasan terhadap tanah, biaya ini akan dikeluarkan agar supaya mendapatkan hak, biaya pematangan, pengukuran, dan biaya-biaya lain juga harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap untuk siap dipakai..

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadikan untuk pembelian tanah dengan dibangun sekolah, maka dalam harga belinya itu juga termasuk dari biaya persiapan lahan aset tersebut.

- B. Gedung dan Bangunan

Harga Biaya perolehan gedung dan bangunan menjelaskan dalam seluruh

biaya yang akan dikeluarkan dan juga masih harus dikeluarkan dalam bentuk gedung dan bangunan sampai siap dipakai. Biaya antara lain harus mencakup harga pembelian dan biaya konstruksi, dan sudah termasuk dalam pengurusan untuk notaris dan pajak. Dalam gedung di dinas perkimtan ini dinilai dengan harga perolehannya dengan siap untuk pakai, dalam hal itu juga termasuk biaya yang akan dikeluarkan yaitu biaya konstruksinya.

C. Peralatan dan Mesin

Standar Akuntansi Pemerintahan menyimpulkan dalam ini biaya perolehan juga aset terdiri dengan harga belinya dan atau konstruksinya juga termasuk bea impor dan juga setiap biaya akan dapat diatribusikan dengan langsung dengan membawa aset ini ke dalam untuk membuat aset ini akan dapat bekerja dalam penggunaan yang dimaksudkannya.

Didaam harga perolehan ini juga bisa tergantung dengan apa barangnya misalnya kursi besi dinas yang beli sudah termasuk pemasangannya.

Untuk pengukur aset mesin dan alat atas pernyataan dapat menyimpulkan sudah sama dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 untuk aset tetap, dalam mesin dan alat ini sudah dari pemasangannya.

4.2.4.2 Aset Donasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan dalam wajarnya nilai aset dicatat dasar sumbangan yang diperoleh dari donasi serta sumbangan yang ada.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini juga belum lama berdiri jadi untuk aset-aset lainnya tetap di dinas ini yang di ambil dari donasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

4.2.6 Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP Nomor 07 mengungkapkan akan laporannya dalam bentuk pengungkapan wajib sebagai berikut:

1. Penilaiannya dasar wajib digunakan dengan menentukan nilai tercatat;
2. Rekonsilias total didalamnya ditulis yang awal dan akhir masal menunjukkan:
3. Dalam Penambahannya;
4. Untuk Pelepasan barang;
5. Nilai rubah penyusut dalam akumulasi;
6. Barang lain dalam mutasi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan dalam dasar penilaian ini untuk digunakan yang menghitung nilai tercatat wajib diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dalam macam-macam aset berupa irigasi, mesin, bangunan, alat dan tanah wajib ditulis untuk neraca yang dipisahkan juga jelas untuk keuangan dilaporannya.

Barang tetap ini sudah atas nama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu irigasi, alat, mesin, bangunan dan tanah dituliskan untuk laporannya sediahrincicatanya.

4.3 Pembahasan

4.3.2 Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Aset Tetap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4.3.1.1 Klasifikasi Aset Tetap

Tabel di bawah ini membandingkan pembagian aset tetap antara Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 4.3.1.1 Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	Keterangan
Tanah termasuknya dalam kelompok aset yaitu peroleh dalam tanah dengan keadaan sedia pakai dan guna untuk aktivitas organisasi atau aktivitas pemerintah di wilayah.	Tanah ini telah dibeli yang tujuannya untuk aktivitas dikantor maksudnya dalam pemerintahan juga sudah sedia memakai, jadi berbeda pula yang tanah tidak dapat digunakan.	Sesuai
Mesin dan alat milik pemerintah dengan maksud guna untuk aktivitas kantor, dengan masa manfaat lebih dari setahun dan juga sedia dipakai apapun kondisinya.	Alat dan Mesin termasuknya yaitu: 1. Kendaraan bermotor: <ul style="list-style-type: none">• Keadaan siap untuk dalam memakai dan periode tanyaaatnya setahun lebih.• Kendaraan bermotor dipakai untuk megantar berkas-berkas kantor ke kantor	Sesuai

	Gubernur. Jadi benar ini digunakan dalam kegiatan pemerintah.	
Bangunan mencakupi meliputi seluruhnya bangunan serta gedung juga diterima dalam keadaan siap dalam digunakan dan dengan tujuannya untuk digunakan dalam operasi entitas.	Gedung dan bangunan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Gedung Olahraga jelas diterima dalam keadaan siap pakai dan digunakan untuk setiap hari jumat kegiatan operasi pemerintah. 	Sesuai
Irigasi jalan serta jaringan ini dibuatkan khususnya pemiliknya pemerintah dalam keadaan berguna serta siap pakai.	Jaringan irigasi serta jalanannya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Jembatan ini harus dalam keadaan siap digunakan oleh rakyat, bangunan ini telah menjadi milik pemerintah. • Bangunan Air ini siap dipakaikan serta bangunan ini milik pemerintah. • Instalasi air bersih, instalasi pembangkit air dengan keadan sedia pakai serta bangunannya dimiliki pemerintah. • Jaringan listrik, jaringan telepon dikuasai pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 	Sesuai

Siap untuk digunakan dalam aktivitas operasi juga dimanfaatkan kegiatan di kantor.	atau buku dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.	
Dalam laporan keuangan belum seluruhnya selesai didalam pembangunannya termasuk kontruksi bagi pengerjaan mencakupi aset.	<p>Kontruksi dengan pengerjaan di dinas mencakupi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan serta Irigasi • Bangunan serta Gedung • Alatannya dengan Mesin <p>Prosesnya untuk perolehannya dengan masa waktu melewati kontruksi ini belum selesai pada tanggal tertentu dalam bentuk pembangunannya. pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu belum selesai. Karena suatu periode dengan pengerjaan suatu butuh waktu penyelesaian.</p>	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.1 klasifikasi aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akurat dan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Dalam hal ini dapat disimpulkan untuk aset tetap yang ada di dinas tersebut ini klasifikasi ini benar karena sama dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010.

Termasuk untuk aset tetap pemerintah adalah:

- a. Untuk dikuasai oleh kelompok pelaporan umumnya dan juga dimanfaatkan pada entitas lainnya, termasuk juga pemerintahan lainnya, universitas dan kontraktor. Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah memenuhi pernyataanya.

PSAP Nomor 07, hal ini disebabkan pemanfaatannya dalam aset di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tidak mungkin juga hanya berguna bagi dinas, namun yang pastinya di manfaati oleh lainnya.

- b. Hak Tanah

Dikomsumsi dengan kegiatan operasional dalam perlengkapan serta bahan karena dalam hal tidak masuk definisi barang berwujud. Dalam barang ini tetap dikuasai bagi pemerintah.

4.3.1.2 Pengakuan Aset Tetap

Tabel 4.3.1.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	Keterangan
<p>Aset tetap ini akan diakui jika memiliki suatu periode yang bermanfaat serta waktu manfaat setahun lebihnya.</p>	<p>Barang berwujud termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi dengan pengerjaan; • Jaringan serta Jalan Irigasi; • Alat dan Mesin; • Aset yang lainnya; dan • Tanah. <p>Diatas keolompok aset ini seluruhnya dalam waktu manfaat dengan waktu lebih dari setahun.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Untuk mengukur dengan handal suatu aset perlu dengan biaya perolehan.</p>	<p>Adanya 2 Metode dalam ukuran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode biaya, model biaya ini di dalam pengakuan awal, dari barang berwujud yang ditulis sebagai perolehannya yang akumulasinya dikurang dalam penyusutan dengan penilaian. 	<p>Sesuai</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Revaluasian yang sama misalnya nilai wajar pada tanggal revaluasi kurangnya akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai terhadap revaluasi. 	
<p>Tidak maksudkan dalam hal ini dalam menjual terhadap kegiatan operasional.</p>	<p>Aset tetap tidak maksud untuk dijual untuk kegiatan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah, tanah ini dimiliki pemerintah yang tidak maksud untuk dijual. akun tanah dengan digunakan dalam jaringan, jalan, jalan, bangunan. • Bangunan ini dibeli pemerintah dengan maksud dipakai dala kegiatan bukan untuk dijual. • Mesin dan alat, tidak maksud dijual dalam operasi normal. • Jaringan irigasi serta jalan untuk digunakan dalam kegiatan operasi dan tidak boleh dijual dalam bentuk apapun. • Kelompok aset yang tidak 	<p>Sesuai</p>

	<p>termasuk dalam aset tetap tapi masih dapat didefinisikan menjadi kelompok aset tetap di dinas ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi dalam pengerjaan, belum selesai tanggalnya. 	
<p>Dimaksud untuk dibangun dengan keadaan siap memakai.</p>	<p>Aset tetap ini yang termasuk tidak dengan menjualnya dalam kegiatan instansi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam aktivitas instansi, tanah tidak untuk dijual, tanah ini digunakan untuk pemerintah. • Sebab tanah ini milik pemerintah. • Tidak dimaksudkan untuk dijual. • Dengan maksud untuk digunakan di kegiatan, • Didasarkan oleh biaya operasional. • Biaya akan diukur secara andal. • Bangunan yang dibeli tidak untuk dijual. • Alat dan Mesin tidak dijual dalam operasi instansi • Irigasi jalan serta jaringan dibangun pemerintah tidak boleh dijual. 	<p>Sesuai</p>

Berdasarkan tabel di atas dikatakan PSAP Nomor 07, didalam aset harus sesuai kelompok aset sebagai berikut:

Berwujud, memiliki juga periode waktu yang setahun lebihnya dan juga biaya perolehan ini diukur dalam andal, dan juga tidak boleh di jual dalam operasional normal, akan diperoleh dengan guna membangun untuk digunakan dengan siap sedia.

Hal ini susah sesuai dengan yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Aset Tetap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara meliputi semua aset berwujud yang akan dimanfaatkan oleh pemerintahan dan juga kepentingan umum.

Maka, tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak masuk dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 karena belum ada bukti dengan ontentik yang menyebutkan dalam bangunan sera tanah sebab belum resmi milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melainkan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

4.3.2 Pengukuran Aset Tetap

Tabel 4.3.2 Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Keterangan
Nilai yang wajar dengan menggunakan aset sebagai biaya perolehan. Maka nilai dalam perolehan tidak mungkin didasarkan nilai wajar.	Digunakan untuk menilai aset tetap. Nilai wajar untuk saat akuisisi dipergunakan dalam menentukan nilai aset tetap maka tidak praktis dalam menilainya untuk perolehan.	Sesuai
Biaya identifikasi dalam bukti pembelian atas pertukaran dapat dipertimbangkan terhadap suatu aset.	Perolehan dalam bahan baku dengan pertukaran untuk pembelian dapat dipertimbangkan kepada kelompok yang berkaitan dengan aset tetap.	Sesuai

Dalam ukuran suatu barang didasari peraturan yang ada maka dalam pengukuran barang berwujud harus mengikuti aturan yang ada dengan perolehannya. Jika nilai suatu barang gunanya suatu barang tersebut serta di peroleh berdasarkan nilai yang wajar dalam pengguna aset tetap.

Dijelaskan dalam aturan ini barang yang berwujud untuk memenuhi kualifikasinya wajib diakui dalam barang dan akan dibagikan bagi barang berwujud yang diawali untuk diukur secara perolehannya.

Pernyataan diatas sudah memenuhi yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4.3.3 Penilaian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 menyimpulkan untuk barang yang berwujud dengan memenuhi tindakan yang iakui bagi aset tetap serta dibagikan dalam barang, awalnya wajib untuk ukur yang didasarkan perolehan. Maka aset tetap bentuknya tidak sama, biaya segera diperoleh.

Dalam komponen terhadap suatu biaya sudah dalam keadaan yang membawa aset ini untu ukur akan dasar suatu barang. Maka aset harus diolah sesuai aturan berdasarkan tabel diatas.

PSAP mengemukakan didalam aset donasi merupakan dalam aset tetap yang dapat dari sumbangan dan ditulis wajib menggunakan nilai yang sewajarnya saat diperoleh suatu aset tetap untuk diperoleh dari sumbangan atau catat harus menggunakan nilai wajar saat aset itu diperolehnya.

Untuk klasifikasinya, didasari fungsi menjadi kelompok aset dengan kesamaan dalam kegiatan operasioanl.

4.3.3.2 Pengungkapan Aset Tetap

Tabel 4.3.3.2 Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	Keterangan
Dasar yang ada Penilaian dengan digunakan digunakan diwajibkan menghitung nilai tercatat harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang ada.	Dinas Perkimtan diungkapkan dengan adanya kelompok aset berdasarkan harga peroleh. Pada lampiran ini daftar aset tetap tahun 2020 dan 2021 sebagai laporan neraca yang di untkapkan berdasarkan pengungkapan terhadap aset tetap.	Sesuai
Harus dinyatakan secara terperinci atas laporan neraca.	Dinas ini sudah sana dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan karena sudah sepeuhnya mengikuti dalam laporan keuangannya sudahh terperinci dan terpisah.	Sesuai

Didalam Laporan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menulis yang ada di dalam informasi terhadap laporan neraca

Dalam penjelasan yang ada pada pos-pos tersebut sangat penting untuk dilaporkan akan suatu laporan neraca, pengungkapan ini sangat penting.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan didalam dasar penilaian untuk dipakai dalam menghitung dengan nilai tercatatnya wajib diungkapkan dalam laporan keuangannya.

Semua sudah dijelaskan ada pada bagian lampiran dalam hal ini yang telah dilakukan wawancara bersama ibu Meinny yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Karena yang diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah mengatakan bahwa dasar penilaian dalam berdasarkan untuk menghitung nilai tercatat wajib diungkapkan dalam laporan keuangan.

Didalam jenis aset yaitu alat dan mesin, tanah, bangunan, gedung, wajib juga terinci dan terpisah dalam catatan laporan keuangan yang ada di instansi pemerintah tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan aset tetap di Dinas Perkimtan sudah sama dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 seperti yang dijelaskan diatas.
2. Pengukuran aset tetap pada Dinas Perkimtan sama dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang aset tetap.
3. Penilaian aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa penilaian aset tetap Peralatan dan Mesin sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07
4. Pengungkapan aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

5.2 Saran

1. Penelitian ini, harapannya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aset tetap di masa mendatang, terutama mengingat betapa pentingnya pengelolaan aset tetap.
2. Selain itu, penggunaan akuntansi aset tetap juga diharapkan diperiksa secara cermat di semua organisasi, terutama pemerintah.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dengan harapan untuk dapat

mengetahui luasnya peranan aset agar dalam penelitian menjadi menarik.

4. Pngelolaan dengan kegiatan aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010 tetap harus dipertahankan.

UKDLSM

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina J. Eva, Utpala Rani. 2020. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 392-400.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ebenheizer Hyskia Koagouw, Hendrik Manossoh. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 74-80.
- Efferin, Sujoko. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, GRAHA ILMU, Yogyakarta.
- Hasanah, Nuramalia dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: In Media.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan ke sepuluh. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mu'am, Ahmad. 2011. *Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.
- Nurdin Awalia. 2022. Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar. *Universitas Muhammadiyah Makasar*, 1-58.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Palandeng, N. A. Ria, Jenny Morasa. 2022. Evaluasi Penerapan PSAP No.7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 29-36
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Jakarta.

Rihma W. Rahmawati. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. *Universitas Islam Riau*, 1-63.

Rosmawati, R., & Ishak, A. A. A. 2018. Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. *In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 12.

Wulandari A Ambarwati. 2022. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 866- 884.

UKDLSM

LAMPIRAN

UKDLSM

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian



UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Kel. Kairagi Satu, Kec. Mapanget, Kota Manado - Sulawesi Utara - 95253

Telepon: +62 811-4390-1500

Surel: sekretariatrektor@unikadelasalle.ac.id, info@unikadelasalle.ac.id

<https://unikadelasalle.ac.id>

Nomor : 0322/Pm/D1/FEB/VIII/2023

Manado, 09 Agustus 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan

Kepada Yth.:

Dinas Perkimtan

Di-

Tempat

Sehubungan dengan Tugas Akhir atau penulisan Skripsi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat mengijinkan mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : Liffi Lucas

NIM : 16041043

Program Studi : Akuntansi

Untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data/informasi dari perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun topik/judul skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan **Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Daerah**

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan oleh Bapak/Ibu pimpinan kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat Kami,



Dr. Ivonne Angelic Umboh, S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tembusan :

- Arsip.



Lampiran 2 Daftar Bimbingan Skripsi

8/4/23, 12:43 PM

Daftar Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE
MANADO INDONESIA
 Kairagi 1 Kombos Manado - 95253
 Telp. 0811-4390-1500
 E-mail: info@unikadolasalle.ac.id

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LIFFI MARISKA KATRIN LUCAS
NIM : 16041043
Judul : Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
DP1 : Franki M. Paath, S.E., Ak., M.M.
DP2 : Margie Christanty Poluan, S.E., M.S.A.

No.	Hari/Tanggal/Jam	Perihal	TTD DP1	TTD DP2	Keterangan
1	Jumat/ 17 Maret 2023/08:00 - 09:30	Ujian Proposal Skripsi	✍		
2	Jumat/ 17 Maret 2023/08:00 - 09:30	Ujian Proposal Skripsi		✍	
3	Senin/ 27 Maret 2023/13:00 - 14:00	Revisi Proposal Skripsi	✍		
4	Senin/ 27 Maret 2023/13:00 - 14:00	Revisi Proposal Skripsi		✍	
5	Senin/ 17 April 2023/13:00 - 14:00	Revisi bab 1,2,3 dan narasi wawancara	✍		
6	Senin/ 17 April 2023/13:00 - 14:00	Revisi bab 1,2,3 dan narasi wawancara		✍	
7	Kamis/ 27 April 2023/10:00 - 11:30	Revisi Landasan Teoretis	✍		
8	Kamis/ 27 April 2023/10:00 - 11:30	Revisi Landasan Teoretis		✍	
9	Kamis/ 22 Juni 2023/08:00 - 09:30	Konsultasi Bab 1,2,3,4	✍		
10	Senin/ 5 Juni 2023/13:00 - 14:00	Penyusunan Bab IV Hasil dan Pembahasan		✍	
11	Selasa/ 27 Juni 2023/08:00 - 09:30	Revisi Bab 2, Tambahan di Bab 4 dan Sistematika Penulisan	✍		
12	Rabu/ 21 Juni 2023/10:00 - 09:30	Konsultasi Bab 1,2,3,4	✍	✍	
13	Rabu/ 28 Juni 2023/08:00 - 09:30	Konsultasi Bab 1,2,3,4	✍		
14	Rabu/ 28 Juni 2023/13:00 - 14:00	Revisi Bab 3	✍	✍	
15	Senin/ 3 Juli 2023/08:00 - 09:30	Hasil dan Pembahasan	✍		
16	Senin/ 3 Juli 2023/13:00 - 14:00	Hasil dan Pembahasan	✍	✍	
17	Kamis/ 13 Juli 2023/10:00 - 11:30	Bab 1-5 dan revisi hasil penelitian	✍		
18	Kamis/ 13 Juli 2023/13:00 - 14:00	Bab 1-5 dan revisi hasil penelitian	✍	✍	
19	Rabu/ 2 Agustus 2023/14:00 - 15:00	Revisi Bab 3-4 Pembahasan	✍		
20	Rabu/ 2 Agustus 2023/14:00 - 15:00	Revisi Bab 3-4 Pembahasan	✍	✍	

Manado, 4 Agustus 2023

Ketua Program Studi,

(Ignatia Rosali Honandar, S.E., M.Sc.)

Dekan,

(Dr. Ivonne Angelic Umboh, S.E., M.Si.)

Lampiran 3 Laporan Neraca Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara



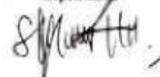
PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2021	2020
1	2	3	4
1	ASET	8.850.706.810,20	7.925.855.264,89
2	ASET LANCAR	189.668.206,00	72.151.225,00
3	Kas dan Setara Kas	159.797.587,00	-
4	Persediaan	29.870.628,00	72.151.225,00
5	ASET TETAP		
6	Tanah	2.982.562.000,00	2.982.562.000,00
7	Peralatan dan Mesin	8.199.207.583,44	7.922.276.432,97
8	Gedung dan Bangunan	4.207.456.924,44	4.188.923.014,10
9	Jalan, Irigasi dan Jaringan	239.440.490,00	154.807.000,00
10	Aset Tetap Lainnya	2.619.424.773,58	2.377.155.270,08
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
12	Akumulasi Penyusutan	(6.788.262.777,26)	(6.788.262.777,26)
13	ASET LAINNYA	136.712.100,00	136.712.100,00
14	Aset Tidak Berwujud	118.248.000,00	118.248.000,00
	Aset Lain-lain	18.464.100,00	18.464.100,00
	JUMLAH ASET	8.850.706.810,20	7.925.855.264,89

15	KEWAJIBAN	199.101.000,00	-
16	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	199.101.000,00	-
17	Utang Belanja	191.101.000,00	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	191.101.000,00	-
19	EKUITAS	8.381.605.810,20	7.925.855.264,89
	EKUITAS	8.381.605.810,20	7.925.855.264,89
	Ekuitas	672.351.107,40	7.925.855.264,89
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.709.254.70,80	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	8.831.605.810,20	7.925.855.264,89
		8.580.706.810,20	7.925.855.264,89

Manado 1 Januari 2022

Kepala Dinas



Stevi H.A. Kepel, ST, MSI

NIP. 19680926 19969 1 005

UKDLSM

Lampiran 4 Rincian Laporan Neraca Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2021	2020
1	2	3	4
1	ASET	8.850.706.810,20	7.925.855.264,89
2	ASET LANCAR	189.668.206,00	72.151.225,00
3	Kas dan Setara Kas	159.797.587,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	159.797.587,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	159.797.587,00	-
6	Persediaan	29.870.628,00	72.151.225,00
7	Barang Habis Pakai	29.870.628,00	72.151.225,00
8	Bahan Bangunan	500.000,00	500.000,00
9	Bahan Bakar dan Pelumas	-	90.000,00
10	Suku Cadang Alat Angkutan	20.000	-
11	Alat Tulis Kantor	15.920.400,00	2.456.350,00
12	Kertas dan Cover	662.000,00	5.933.400,00
13	Bahan Cetak	5.937.528,00	19.438.200,00
14	Benda Pos	300.000,00	-
15	Bahan Komputer	945.000,00	3.371.050,00
16	Perabot Kantor	1.957.700,00	29.785.225,00
17	Alat Listrik	616.000,00	3.017.000,00
18	Perlengkapan Dinas	-	6.000.000,00
19	Alat Bahan Kantor Lainnya	3.022.000,00	-
20	Persediaan untuk Masyarakat	-	1.500.000,00
21	ASET TETAP		
23	Tanah	2.982.562.000,00	2.982.562.000,00
24	Peralatan dan Mesin	8.199.207.583,44	7.922.276.432,97
25	Alat Besar	475.132.344,70	-
26	Alat Besar Lainnya	475.132.344,70	-

27	Alat Angkutan	2.868.346.068,09	-
28	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.802.446.068,09	-
29	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	65.900.000,00	-
30	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.741.233,08	-
31	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.742.233,08	-
32	Alat Pertanian	8.390.000,00	-
33	Alat Peternakan	8.390.000,00	-
34	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.287.094.081,26	7.922.276.432,97
35	Alat Kantor Lainnya	4.204.754.081,26	7.922.276.432,97
36	Mebel	57.190.000,00	-
37	Alat Rumah Tangga	5.750.000,00	-
38	Meja Rapat Tangga Lainnya	14.400.000,00	-
39	Meja Rapat Pejabat	2.000.000,00	-
40	Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	-
41	Lemari dan Arsip Pejabat	3.000.000,00	-
42	Alat Studio Komunikasi	528.221.856,28	-
43	Peralatan Studio Audio	525.221.856,28	-
44	Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.282.000,00	-
45	Alat Kedokteran Umum	17.282.000,00	-
46	Alat Laboratorium	10.000.000,03	-
47	Alat Laboratorium Umum	10.000.000,03	-
48	Gedung dan Bangunan	4.207.456.924,44	4.188.923.014,00
49	Bangunan Gedung	4.207.456.924,44	4.207.456.924,44
50	Bangunan Gedung Kantor	4.207.456.924,44	4.207.456.924,44
51	Jalan Irigasi dan Jaringan	239.440.490,00	2.377.555.270,08
52	Aset Tetap Lainnya	2.619.424.773,58	2.377.555.270,08
53	Bahan Perustakaan	2.618.024.773,58	-
54	Buku Umum	2.610.588.548,58	-
55	Bahan Perpustakaan Tercetak	7.436.225,00	-
56	Barang Bercorak Kesenian	250.000,00	-
57	Alat Bercorak Kebudayaan	250.000,00	-
58	Tanaman	1.150.000,00	-
59	Tanaman	1.150.000,00	-
60	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00

61	Kontruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
62	Kontruksi Dalam Pegerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
63	Akumulasi Penyusutan	(6.788.262.777,26)	(6.788.262.777,26)
64	Akumulasi Penyusutan Peralatan	(6.788.262.777,26)	(6.788.262.777,26)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(6.788.262.777,26)	(6.788.262.777,26)
66	ASET LAINNYA	136.712.100,00	136.712.100,00
67	Aset Tidak Berwujud	118.000.248,00	18.000.248,00
68	Aset Tidak Berwujud	118.000.248,00	118.000.248,00
69	Software	118.000.248,00	118.000.248,00
70	Aset Lain-lain	18.464.100,00	18.464.100,00
71	Aset Lain-lain	18.464.100,00	18.464.100,00
72	Aset Barang Rusak	18.464.100,00	18.464.100,00
	JUMLAH ASET	8.580.706.810	8.580.706.810

Manado 1 Januari 2022

Kepala Dinas



Steve H.A. Kepel, ST, MSi

NIP. 19680926 19969 1 005

UKDLSM



UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

(Terakreditasi BAN – PT)

Alamat : Kairagi I, Kombos, Manado – Sulawesi Utara

Telp. (0431) 871957, 871971, 877512. Fax. (0431) 871972

Website : <http://www.unikadelasalle.ac.id>

E-mail : Info@delasalle.ac.id

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari Kamis, Tanggal 15, Bulan Juni, Tahun 2023, telah dilaksanakan wawancara dengan Ibu Meinny Kolibu. Untuk keperluan Penelitian Skripsi yang berjudul: "Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara."

Topik wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap
2. Pengukuran aset tetap
3. Penilaian aset tetap
4. Pengungkapan aset tetap

Demikianlah Berita Acara Pelaksanaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Manado, 18 Agustus 2023

Narasumber

Kasubag Keuangan dan Perencanaan

Ibu Meinny Kolibu, SE,Ak,ME

Pewawancara

Mahasiswa

Liffi Lucas

Lampiran 6 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Hari/ Tanggal : Kamis 15 Juni 2023

Waktu Wawancara : 11.15-12.45

Lokasi Wawancara : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Identitas Narasumber

Narasumber : Meinny Kolibu, S.E, Ak,ME

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Hasil Wawancara :

Pewawancara : Ada berapa jenis klasifikasi aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

Narasumber : Untuk aset tetap di dinas perkimtan bermacam macam seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dll.

Pewawancara : Apakah klasifikasi aset tetap di Dinas Perkimtan sudah menerapkan PSAP?

Narasumber : Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah atau dimanfaatkan. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, lainnya signifikan manfaatnya lebih dari dua belas bulan dalam kondisi siap pakai. Jalan, sistem irigasi, dan jaringan termasuk yang dibangun oleh pemerintah, berada dalam kepemilikan atau penguasaannya, dan dalam keadaan siap pakai.

Pewawancara : Apakah aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diakui dan mempunyai masa manfaat 12 bulan?

Narasumber : Aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki masa manfaat ekonomi di masa depan dapat diperoleh. Aset tetap tetap digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan operasionalnya dan tidak untuk dijual.

Pewawancara : Apakah aset tetap dibangun dengan maksud untuk digunakan?

Narasumber : Aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya digunakan untuk operasi pemerintah dan dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pewawancara : Apakah aset tetap di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di nilai dengan biaya perolehan?

Narasumber : Biaya tersebut digunakan untuk menilai aset tetap. Nilai wajar pada saat akuisisi digunakan untuk menentukan nilai aset tetap jika tidak praktis untuk menilainya pada biaya perolehan.

Pewawancara : Apakah pengukuran dalam penilaian aset tetap dapat dipertimbangkan dengan andal?

Narasumber : Aaset tetap yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut.

Pewawancara : Apakah dasar penilaian aset tetap pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara digunakan untuk menghitung nilai tercatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan?

Narasumber : Semua aset di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti tanah, gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dinyatakan dalam laporan keuangan.

Manado, 18 Agustus 2023



Meinny Kolibu, S.E,Ak,Me

Lampiran 7 Dokumentasi



Lampiran 8 BAP Pemeriksaan Plagiarisme



UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi B)

Alamat : Kairagi I, Kombos, Manado – Sulawesi Utara
Telp. (0431) 871957, 871971, 877512. Fax. (0431) 871972
Website : <http://www.unikadelasalle.ac.id>
E-mail : Info@delasalle.ac.id

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Pada Hari **Senin, 28 Agustus 2023** telah dilaksanakan **Pemeriksaan Plagiarisme** dengan menggunakan aplikasi Turnitin dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dokumen berupa : (silahkan centang lampiran yang sesuai)

- LAPORAN KERJA PRAKTEK
 SKRIPSI
 JURNAL
 Lainnya

Nama Penulis : LIFFI LUCAS
Judul : EVALUASI PENERAPAN PSAP NOMOR 07
TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA
Tanggal Masuk Dokumen : 26 AGUSTUS 2023
Hasil Scan Turnitin : 15%

Operator Turnitin Program Studi Akuntansi

Penulis

Ignatia R. Honandar, S.E., M.Sc
NIDN: 0925058402

Liffi Lucas

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Ignatia R. Honandar, S.E., M.Sc

Lampiran 9 Hasil Pemeriksaan Plagiarisme

Liffi Lucas LIFFI LUCAS_16041043_SKRIPSI.docx

Submission Details Help turnitin

Top sources All Sources

15%
Overall Similarity

1 ejournal.unsrat.ac.id 4%
INTERNET

2 repository.uin-suska.ac.id <1%
INTERNET

3 etheses.uin-malang.ac.id <1%
INTERNET

4 Universitas Teknologi Petronas o... <1%
SUBMITTED WORKS

5 eprints.ums.ac.id <1%
INTERNET

6 docplayer.info <1%
INTERNET

7 mitrakab.go.id <1%
INTERNET

8 kejoatrisnawati.wordpress.com <1%
INTERNET

15%
Overall Similarity

1 Flag

81

Share 🔍 🔍

Page 1 of 64

**EVALUASI PENERAPAN PSAP NOMOR 07 TENTANG
AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

LIFFI LUCAS
16041043

UKDLSM